



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL LAPORAN NUSANTARA

JULI 2025



Volume 20 nomor 3 | ISSN: 2527-435X

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

LAPORAN
NUSANTARA

JULI 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PRAKATA	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAGIAN I Perkembangan Terkini dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Daerah	3
BAGIAN II Perkembangan Terkini dan Prospek Inflasi Daerah	9
BAGIAN III Perkembangan Terkini Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	11
BAGIAN IV Isu Strategis: Potensi <i>Demand</i> dan <i>Supply</i> Pembiayaan dalam Mendukung Intermediasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	13

Prakata

Laporan Nusantara merupakan laporan yang menyampaikan gambaran kondisi terkini dan prospek perekonomian nasional dalam perspektif spasial. Asesmen perekonomian spasial didasarkan pada perkembangan perekonomian di lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Laporan ini dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Publikasi Laporan Nusantara edisi ini secara khusus mengangkat isu strategis mengenai “Prospek Perekonomian serta Potensi *Demand* dan *Supply* Pembiayaan dalam Mendukung Intermediasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Isu ini menjadi penting didalami sejalan dengan prospek perekonomian dunia yang diliputi oleh ketidakpastian sehingga pada gilirannya dapat memengaruhi perekonomian daerah. Oleh karenanya, kinerja sektor utama dan pembiayaan perlu terus didorong untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh solid. Kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah. Semangat optimisme direfleksikan melalui desain Burung Garuda gedung Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Ibu Kota Nusantara (Koperbi IKN) yang merepresentasikan semangat untuk bangkit. Kami berharap Bank Indonesia dapat senantiasa mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh Nusantara. Harapan tersebut sebagaimana kami visualisasikan pada peta Nusantara, dengan sentuhan motif batik Tangkawang Ampiek yang bermakna rizki dan kesehatan untuk mencapai kemakmuran bangsa.

Jakarta, 18 Juli 2025

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter



Firman Mochtar
Direktur Eksekutif

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan II 2025 diperkirakan tetap terjaga di tengah eskalasi ketidakpastian global. Perbaikan kinerja investasi mendukung perekonomian di seluruh wilayah. Penambahan kapasitas hilirisasi di wilayah sentra hilirisasi mineral, seperti Sulampua, Kalimantan, dan Balinusra menjadi penopang pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia. Khusus Sulampua, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh membaiknya ekspor pertambangan. Kinerja positif dari sisi ekspor juga menopang pertumbuhan di Sumatera dan Jawa seiring upaya *front loading* pengiriman barang ke Amerika Serikat (AS) sebagai respon terhadap rencana penerapan kebijakan tarif. Peningkatan kinerja investasi dan ekspor tersebut berkontribusi pada tetap terjaganya pertumbuhan ekonomi daerah, di tengah terbatasnya topan kinerja konsumsi pascaHBKN Ramadan dan Idulfitri. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh perbaikan sektor konstruksi di seluruh wilayah yang bersumber dari perbaikan belanja infrastruktur swasta dan pemerintah. Kinerja LU Pertambangan juga diperkirakan membaik di mayoritas wilayah luar Jawa seiring peningkatan produksi. Sementara itu, LU Industri di Sulampua dan Balinusra diperkirakan tumbuh tinggi didukung hilirisasi mineral nikel dan tembaga.

Perekonomian wilayah pada 2025 diperkirakan tetap baik dan perlu terus didorong. Peran investasi dalam menjaga daya tahan ekonomi daerah perlu terus dipertahankan pada semester II 2025, di tengah tekanan eksternal akibat dampak perang dagang. Berbagai proyek investasi besar baik pada LU industri petrokimia, otomotif dan elektronik di Jawa, maupun hilirisasi logam dasar di Sulampua, Balinusra, dan Kalimantan diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2025. Dukungan kebijakan Pemerintah untuk mendorong konsumsi RT dan akselerasi belanja fiskal pusat dan daerah diperkirakan turut menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sisi lapangan usaha, tambahan kapasitas produksi hilirisasi mineral diperkirakan mendukung kinerja LU Industri Pengolahan, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Selain itu, perbaikan sektor pertanian di seluruh wilayah seiring dukungan program prioritas Pemerintah diperkirakan juga akan menopang perekonomian daerah.

Inflasi IHK gabungan kota di seluruh wilayah pada triwulan II 2025 terkendali. Inflasi inti tercatat rendah

sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan normalisasi permintaan domestik pascaHBKN Ramadan dan Idulfitri. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) terkendali di bawah target 5%, meski meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya seiring berakhirnya panen raya di berbagai wilayah. Sementara itu, inflasi kelompok *administered prices* (AP) meningkat akibat berakhirnya kebijakan diskon tarif pemerintah. Secara provinsi, inflasi di mayoritas provinsi masih dalam rentang sasaran dengan inflasi tertinggi terjadi di Papua Selatan sebesar 3,00% (yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi di Papua Barat yang tercatat deflasi 0,67% (yoy).

Inflasi IHK 2025 di seluruh wilayah diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Terkendalinya inflasi didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga ekspektasi inflasi terjangkau dalam sasaran, *imported inflation* yang terkendali, serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi VF terjaga didukung cuaca yang lebih kondusif, pasokan yang lebih baik dan upaya pengendalian inflasi pangan yang terus diperkuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Berbagai upaya peningkatan produksi diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan antara lain dilakukan melalui (i) penambahan luas lahan pertanian, (ii) perbaikan sarana produksi dan kemudahan penyaluran input produksi, serta (iii) perluasan penggunaan teknologi pertanian.

Ke depan, tantangan lingkungan strategis global, termasuk risiko geopolitik, dan prospek domestik perlu terus dicermati. Prospek perekonomian dunia masih diliputi oleh ketidakpastian tinggi yang pada gilirannya akan memengaruhi perekonomian daerah. Dari sisi domestik, kinerja sektor utama dan pembiayaan perlu terus didukung untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh solid. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang mendorong peningkatan intermediasi perbankan dengan mempertimbangkan sektor potensial sesuai karakteristik di masing-masing wilayah. Secara khusus pada Laporan Nusantara ini akan mengulas strategi tersebut yang secara lengkap akan disampaikan pada Bagian IV Isu Strategis: *Prospek Perekonomian serta Potensi Demand dan Supply Pembiayaan dalam Mendukung Intermediasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.*

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAGIAN 1

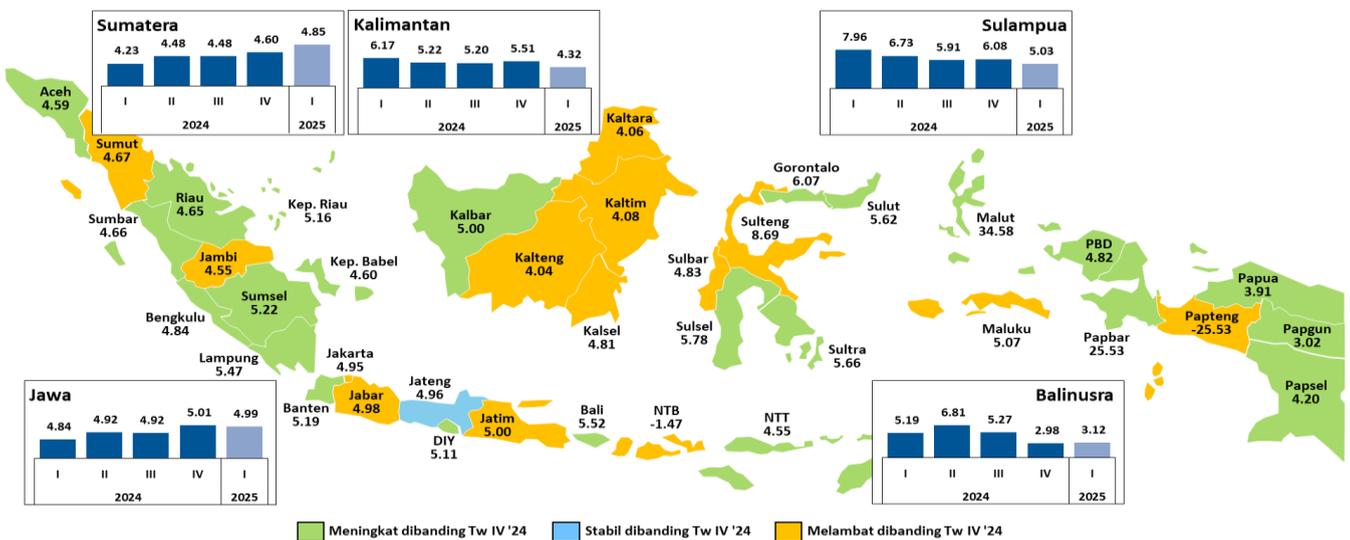
Perkembangan Terkini dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan II 2025 diperkirakan tetap terjaga di berbagai wilayah. Permintaan domestik di seluruh wilayah ditopang oleh perbaikan investasi sejalan dengan kinerja LU Konstruksi. Peningkatan investasi tersebut antara lain didorong oleh hilirisasi tembaga dan bauksit, khususnya di Balinusra dan Kalimantan. Investasi untuk perluasan kapasitas produksi tersebut mendorong kinerja industri logam dasar berorientasi ekspor tumbuh tinggi di kedua wilayah. Selain ekspor logam dasar, kinerja sektor eksternal juga dipengaruhi *front loading* ekspor ke AS dari Jawa dan Sumatera. Ekspor beberapa komoditas utama kedua wilayah tersebut, terutama garmen, alas kaki, dan elektronik, meningkat cukup tajam pada triwulan II 2025. Sementara dari Sulampua, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh perbaikan ekspor dan produksi pertambangan yang sebelumnya terkendala perizinan. Berbagai dinamika tersebut menopang kinerja perekonomian daerah tetap kuat

pada triwulan II 2025, di tengah perlambatan konsumsi RT pascaHBKN Ramadan dan Idulfitri.

Prospek perekonomian daerah diperkirakan tetap baik pada 2025 di tengah tekanan ekonomi global. Perbaikan investasi masih akan mendorong prospek ekonomi daerah pada 2025. Investasi hilirisasi logam di Balinusra dan Kalimantan diperkirakan terus berlanjut dan mendukung kinerja LU Industri Pengolahan hingga akhir 2025. Investasi swasta *multiyears* di wilayah lainnya juga diperkirakan akan menopang pertumbuhan di tengah terbatasnya investasi Pemerintah pada 2025. Lebih lanjut, berbagai kebijakan Pemerintah, baik realokasi anggaran ke program-program prioritas maupun stimulus ekonomi, berupa subsidi transportasi dan penebalan bantuan sosial, juga diperkirakan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025. Dari sisi eksternal, risiko kebijakan tarif AS masih perlu mendapat perhatian, terutama dampaknya di Sumatera dan Jawa yang memiliki intensitas perdagangan yang tinggi dengan AS.



Sumber: BPS, diolah.

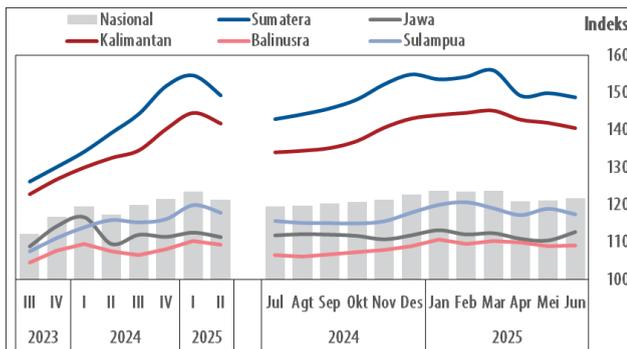
Gambar I.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan I 2025

Konsumsi Swasta

Konsumsi swasta diperkirakan tetap terjaga pada triwulan II 2025. Konsumsi swasta ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga (RT), di tengah terbatasnya pertumbuhan konsumsi LNPRT sepanjang tahun 2025. Konsumsi RT diperkirakan masih tumbuh

tinggi di berbagai wilayah, meskipun dampak HBKN Ramadan dan Idulfitri telah mereda pada triwulan laporan. Dari sisi pendapatan, kinerja ekspor di berbagai daerah diperkirakan masih kuat pada triwulan II 2025, di tengah risiko perang dagang. Pendapatan kelas bawah juga masih kuat, terindikasi dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih tinggi pada triwulan II 2025, terutama di

Sumatera dan Kalimantan (Grafik I.1). Pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil negara pada Juni 2025 diperkirakan turut menopang terjaganya pendapatan masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan paket stimulus ekonomi yang berlaku pada Juni dan Juli 2025, antara lain berupa subsidi transportasi dan penebalan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai mencapai Rp24,44 triliun. Melalui implementasi berbagai kebijakan tersebut, konsumsi RT pada triwulan II 2025 diperkirakan akan tetap kuat, meskipun sedikit melambat dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya.



Sumber: BPS, diolah

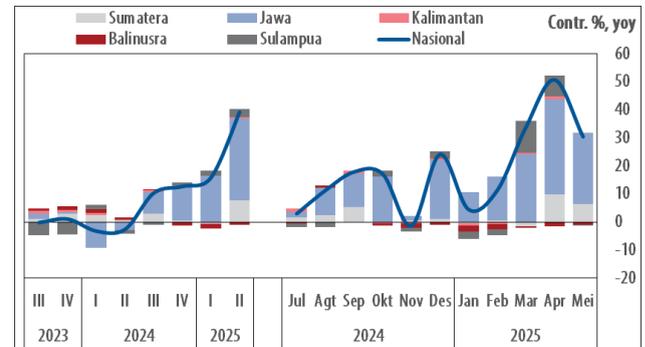
Grafik I.1. Nilai Tukar Petani

Konsumsi swasta di berbagai daerah perlu terus didorong untuk menjaga pertumbuhan 2025. Kebijakan Pemerintah yang telah digulirkan sejak semester I 2025 diperkirakan berdampak positif terhadap pertumbuhan konsumsi RT hingga akhir tahun. Terjaganya tingkat inflasi di seluruh wilayah diperkirakan turut menopang kinerja konsumsi RT ke depan. Prospek konsumsi RT di Sumatera dan Kalimantan diperkirakan ditopang oleh terjaganya pendapatan ekspor seiring harga komoditas yang masih relatif tinggi. Di Jawa, pendapatan kelas bawah diperkirakan didukung perbaikan kinerja produksi pertanian seiring kondisi cuaca yang cukup baik. Selain itu, relaksasi kebijakan perjalanan dinas Pemerintah diperkirakan akan meningkatkan pendapatan pekerja di LU Akmamin pada semester II 2025. Konsumsi RT Balinusra juga didukung oleh terjaganya pendapatan pekerja LU Pertanian dan LU Akmamin sejalan masih tingginya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara pada semester I 2025.

Investasi

Pertumbuhan investasi daerah pada triwulan II 2025 diperkirakan meningkat di seluruh wilayah, terutama di Jawa. Pertumbuhan investasi terutama didorong investasi pada LU utama wilayah, seperti LU Industri dan Pertambangan, serta investasi terkait proyek Pemerintah. Di wilayah Jawa, pertumbuhan investasi

didorong terutama oleh berlanjutnya investasi swasta di kawasan industri. Sementara itu, investasi industri logam dasar terkait pertambangan dan hilirisasi mineral menjadi salah satu pendorong perbaikan di Sulampua, Kalimantan, dan Balinusra. Perbaikan investasi tersebut terkonfirmasi dari impor barang modal pada triwulan II 2025 yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya.



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.2. Impor Barang Modal Wilayah

Perbaikan investasi perlu terus didorong untuk mendukung pertumbuhan 2025. Investasi Jawa diperkirakan masih akan menjadi pendorong utama investasi nasional. Investasi di Jawa akan didukung oleh investasi swasta pada industri petrokimia, otomotif dan teknologi di kawasan industri dan KEK. Selain itu, berlanjutnya investasi hilirisasi di luar Jawa diperkirakan akan menopang kinerja investasi di Sulampua, Kalimantan dan Balinusra. Di Sulampua, investasi bersumber dari pembangunan proyek swasta di bidang pertambangan minyak dan gas serta hilirisasi Nikel. Di Kalimantan, berlanjutnya hilirisasi bauksit menjadi alumunium dan alumina akan meningkatkan kinerja investasi yang bersumber dari pembangunan infrastruktur dasar. Sementara itu, di Balinusra, investasi hilirisasi tembaga di NTB masih akan berlanjut didorong oleh kegiatan perluasan area tambang.

Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

Kinerja fiskal daerah diperkirakan membaik pada triwulan II 2025 yang bersumber dari realisasi berbagai stimulus dan program prioritas Pemerintah. Hingga Mei 2025, realisasi belanja Pemerintah daerah terhadap pagu tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Hal ini didorong oleh kenaikan belanja barang dan jasa, terutama pada sektor prioritas Pemerintah< seperti belanja operasional sekolah dan kesehatan/puskesmas. Perbaikan belanja juga didukung oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring peningkatan pendapatan pajak dan retribusi di Jawa, Sumatera, dan Balinusra. Namun demikian, masih

berlangsungnya proses penyusunan APBD-P 2025 dan penyelesaian administrasi terkait syarat salur Transfer ke Daerah (TKD), menahan akselerasi belanja daerah yang lebih tinggi.

Tabel I.1. Transfer ke Daerah (TKD)

Transfer ke Daerah (Triliun Rp)	Alokasi			Realisasi			
	2024	2025 Pasca Efisiensi	s.d. Mei 24	s.d. Mei 25	%thdp pagu s.d. Mei 24	%thdp pagu s.d. Mei 25	s.d. Mei 25 (yoy)
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	140.07	159.86	45.12	39.54	32.21%	24.74%	-12.36%
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	427.70	430.96	186.24	163.12	43.54%	37.85%	-12.41%
3. Dana Transfer Khusus	187.43	166.93	51.79	56.06	27.63%	33.58%	8.25%
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.82	18.65	1.16	1.20	2.15%	6.46%	3.87%
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	133.09	146.68	50.52	54.76	37.96%	37.33%	8.39%
c. Hibah ke Daerah	0.51	1.61	0.11	0.10	21.72%	6.22%	-10.32%
4. Dana Otsus	19.69	15.01	2.84	1.20	14.40%	8.02%	-57.56%
5. Dana Keistimewaan DIY	0.00	0.00	1.14	1.07	0.00%	0.00%	-5.55%
6. Dana Desa	69.00	69.00	28.38	29.21	41.13%	42.33%	2.92%
7. Insentif Fiskal	4.00	6.00	0.82	1.04	20.61%	17.27%	25.63%
TKD	847.89	847.76	316.33	291.25	37.31%	34.36%	-7.93%

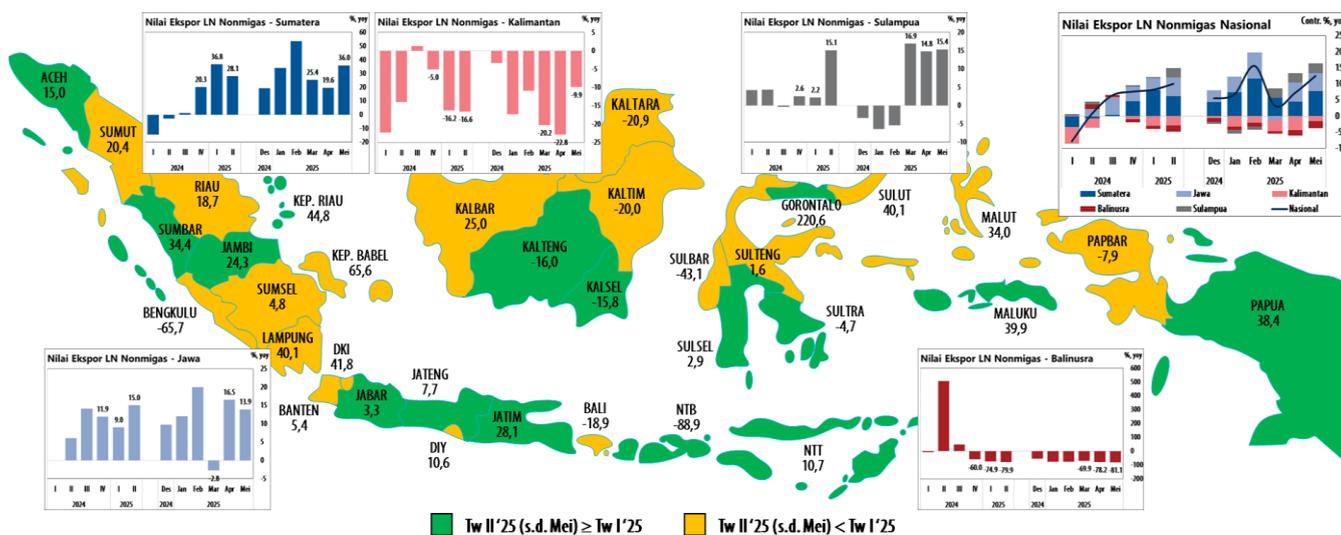
Sumber: Kemenkeu, diolah

Perbaikan realiasi belanja diprakirakan berlanjut pada semester II sesuai pola historis. Perbaikan realisasi belanja juga didukung penyelesaian proses realokasi anggaran dalam APBD-P 2025 dan administrasi terkait syarat salur Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, realisasi belanja juga didorong oleh pelonggaran kegiatan MICE Pemerintah dan akselerasi program prioritas Pemerintah. Namun demikian, kinerja fiskal daerah pada

keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tetap terbatas sejalan pagu serapan anggaran yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Ekspor Luar Negeri

Kinerja ekspor nonmigas pada triwulan II 2025 hingga Mei tumbuh positif, terutama ditopang Jawa dan Sulampua. Peningkatan ekspor di wilayah Jawa utamanya didorong oleh permintaan emas yang terus meningkat sebagai aset *safe haven* pada kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian tinggi. Dari sisi suplai, beroperasinya pabrik emas di Gresik pada Maret 2025 menjadi daya dukung peningkatan ekspor komoditas tersebut. Peningkatan ekspor Jawa juga dipengaruhi oleh upaya *front loading* pengiriman barang ke AS sebagai respon terhadap rencana penerapan kebijakan tarif. Indikasi *front loading* ekspor ke AS juga terlihat di wilayah Sumatera dan Kalimantan pada komoditas elektronik dan CPO. Sementara itu, kenaikan ekspor Sulampua didorong oleh kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga oleh Pemerintah yang berlaku sejak April hingga September 2025.



Sumber: Bea Cukai, diolah (data triwulan II 2025 s.d. Mei 2025)

Gambar I.2. Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan II 2025 (%yoy)

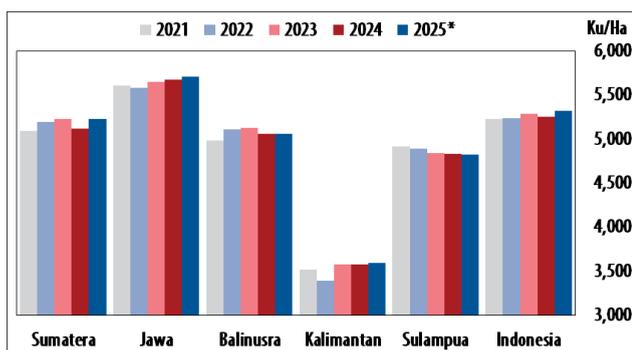
Prospek komoditas ekspor wilayah untuk keseluruhan 2025 tetap terjaga, di tengah kondisi global yang masih dipenuhi ketidakpastian tinggi. Prospek ekspor komoditas hilirisasi mineral di Kawasan Timur Indonesia diprakirakan masih positif. Ekspor produk besi baja di Sulampua juga diprakirakan masih meningkat, didorong oleh permintaan *nickel pig iron* dan *ferronickel* dari Tiongkok. Prospek ekspor di wilayah tersebut juga didukung oleh masih berlanjutnya penambahan kapasitas produksi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Di Kalimantan, ekspor hilirisasi mineral ditopang

oleh penambahan kapasitas produksi industri alumina. Namun demikian, peningkatan ekspor komoditas hilirisasi tersebut belum dapat mengompensasi tekanan pada ekspor batubara. Pertumbuhan ekspor hilirisasi juga akan berlanjut di Balinusra sejalan dengan peningkatan produksi selama proses transisi hilirisasi yang terjadi secara gradual hingga akhir 2025. Sementara itu, prospek ekspor Jawa dan Sumatera diprakirakan akan menghadapi tantangan pascapenerapan kebijakan tarif oleh AS pada semester II, meski ekspor emas, CPO dan elektronik tetap terjaga.

LU Pertanian

Kinerja LU Pertanian triwulan II 2025 diprakirakan melambat seiring berakhirnya panen raya. Periode panen raya padi dan jagung 2025 terjadi pada triwulan I yang bergeser dari tahun sebelumnya pada triwulan II. Pergeseran panen raya padi terjadi merata di seluruh wilayah akibat faktor cuaca yang lebih kondusif. Meski demikian, kinerja LU Pertanian pada triwulan II 2025 diprakirakan masih tumbuh positif, antara lain ditopang produksi aneka bawang dan cabai di Jawa dan panen tandan buah segar kelapa sawit di Sumatera.

Secara keseluruhan 2025, LU Pertanian diprakirakan tumbuh lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Cuaca yang lebih kondusif dan dukungan program Pemerintah menjadi pendorong perbaikan produksi sepanjang 2025. Produksi komoditas tanaman pangan, khususnya padi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan diprakirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi 2024. Peningkatan produksi padi dipengaruhi oleh perbaikan produktivitas (Grafik 1.3) seiring dukungan berbagai intervensi kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mengakselerasi target swasembada pangan. Intervensi kebijakan tersebut mencakup antara lain: (i) penambahan luas lahan dengan mengoptimalkan lahan rawa; (ii) perbaikan sarana produksi seperti irigasi dan penyediaan pompal (iii) kemudahan penyaluran pupuk dan penggunaan teknologi pertanian, seperti melalui perluasan mekanisasi. Sementara itu, produksi TBS kelapa sawit diprakirakan tertahan disebabkan penurunan produktivitas, di tengah realisasi Program Peremajaan Sawit (PSR) yang masih terbatas.



Sumber: BPS, diolah

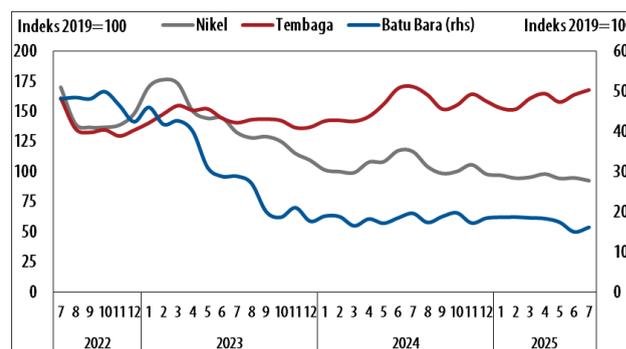
Ket.: *proyeksi s.d. bulan Juni 2025

Grafik 1.3. Perkembangan Produktivitas Lahan Padi

LU Pertambangan

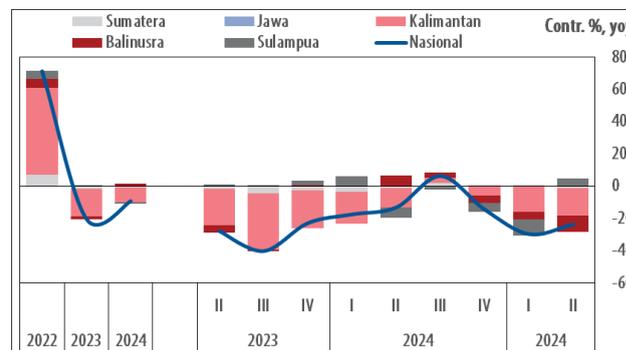
Pada triwulan II 2025, kinerja LU Pertambangan membaik di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulampua. Kinerja tambang di Sumatera, meningkat didorong oleh penambahan kapasitas *lifting* minyak di Kepulauan Natuna dan berlanjutnya implementasi

Development Drilling Program (DDP) yang memperkuat produksi minyak dan gas di sumur-sumur tua. Kebijakan Pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga dan dimulainya proses *commissioning smelter* Gresik sejak Juni 2025 juga menjadi pendorong perbaikan kinerja pertambangan di wilayah Sulampua. Sementara di Kalimantan, menguatnya kinerja pertambangan disebabkan oleh peningkatan produksi batubara untuk pemenuhan domestik. Berbeda dengan ketiga wilayah tersebut, pertambangan di wilayah Balinusra diprakirakan masih tertekan akibat penurunan kualitas bijih tembaga selama fase ekspansi.



Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik 1.4. Harga Acuan Komoditas Tambang Nasional



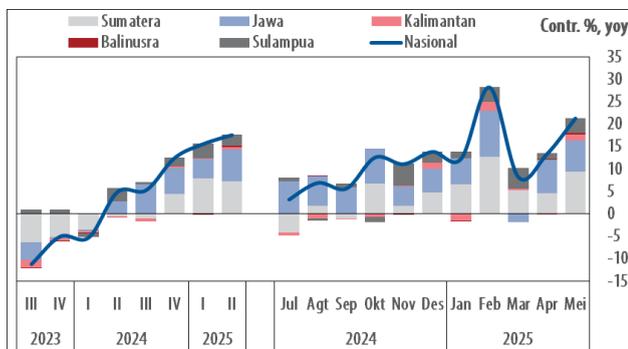
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.5. Nilai Ekspor Pertambangan Wilayah

Prospek kinerja LU Pertambangan pada 2025 diperkirakan terbatas. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) produksi batu bara yang lebih rendah dibandingkan kondisi tahun sebelumnya dan melemahnya permintaan batu bara global diprakirakan akan membatasi pertumbuhan LU pertambangan di Kalimantan. Setelah menunjukkan perbaikan pada triwulan II, kinerja tambang tembaga di Sulampua diprakirakan tertahan secara keseluruhan tahun akibat terbatasnya kuota ekspor yang akan berakhir pada semester II. Di Balinusra, tekanan produksi yang terjadi pada triwulan II diprakirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Sementara itu, perbaikan kinerja tambang diprakirakan akan terjadi di Sumatera didukung oleh peningkatan produksi minyak dan gas.

LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan tetap kuat pada triwulan II 2025. Ekspor industri pengolahan pada triwulan laporan meningkat ditopang perbaikan ekspor Jawa (Grafik 1.6). Kinerja industri Jawa ditopang peningkatan produksi TPT, alas kaki, dan elektronik untuk memenuhi permintaan AS sebelum pemberlakuan tarif impor. Sementara itu, permintaan domestik untuk industri kembali normal pascaHBKN Ramadan dan Idulfitri. Kinerja industri Balinusra juga meningkat tinggi pada triwulan laporan, ditopang perbaikan produksi industri hilirisasi tembaga berorientasi ekspor di NTB. Di wilayah lainnya, kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan tetap tinggi meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Industri logam di Kalimantan tumbuh tinggi, khususnya industri alumina di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara didukung peningkatan kapasitas produksi yang cukup signifikan. Di Sulampua, industri hilirisasi nikel masih menjadi sumber utama pertumbuhan LU Industri Pengolahan. Sementara di Sumatera, melambatnya produksi CPO diperkirakan memengaruhi pertumbuhan LU industri Pengolahan di wilayah tersebut, meskipun kinerja industri elektronik tetap tinggi untuk memenuhi permintaan AS pada triwulan laporan.



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.6. Nilai Ekspor Industri Pengolahan Wilayah

Industri hilirisasi mineral diperkirakan akan terus mendukung kinerja LU Industri Pengolahan pada 2025, terutama di KTI. Keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional saat pandemi turut memicu perluasan hilirisasi ke komoditas pertambangan utama lainnya, khususnya bauksit dan tembaga. Perkembangan pesat industri hilirisasi kedua komoditas diperkirakan mendorong kinerja LU Industri Pengolahan di Kalimantan dan Balinusra. Pengembangan industri alumina dan aluminium di Kalimantan diperkirakan berdampak positif pada kinerja LU Industri Pengolahan Kalimantan yang meningkat tinggi pada 2025. Di Balinusra, peningkatan kapasitas

produksi industri hilirisasi tembaga akan terus berlanjut secara gradual sampai dengan akhir 2025. Perbaikan LU Industri Pengolahan Sulampua juga bersumber dari tingginya pertumbuhan industri hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Di Sumatera dan Jawa, prospek kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan lebih disumbang oleh permintaan domestik. Industri CPO di Sumatera diperkirakan tetap tumbuh untuk memenuhi permintaan biodiesel untuk kebutuhan dalam negeri. Di Jawa, berbagai program Pemerintah terkait ketahanan pangan diperkirakan berampak positif terhadap kinerja industri makanan dan minuman, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

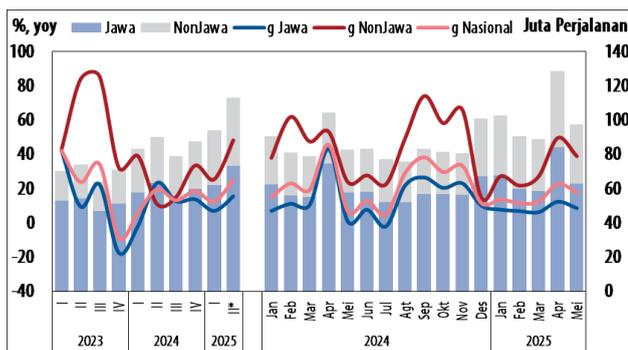
LU Perdagangan

Kinerja LU Perdagangan triwulan II 2025 diperkirakan tetap terjaga di berbagai wilayah. Dinamika perdagangan internasional memengaruhi terjaganya kinerja LU Perdagangan, di tengah perdagangan domestik yang melambatnya pascaHBKN Ramadan dan Idulfitri. Di Sumatera, kinerja positif LU Perdagangan ditopang ekspor yang masih kuat, terutama elektronik ke AS. Perdagangan ritel domestik juga masih terjaga, didukung sentimen konsumen yang masih dalam rentang optimis. Kinerja LU Perdagangan Jawa juga ditopang *front loading* ekspor berbagai komoditas manufaktur ke AS. Di Balinusra dan Sulampua, kinerja LU Perdagangan didukung ekspor komoditas pertambangan dan industri pengolahan. Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara yang masih tinggi mendukung kinerja LU Perdagangan di Balinusra. Sementara di Kalimantan, kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2025 diperkirakan melambat dipengaruhi baik perdagangan domestik maupun ekspor.

Pada keseluruhan 2025, kinerja LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari kinerja positif di wilayah Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Perbaikan di Sumatera terutama didorong oleh kinerja ekspor, yang turut berdampak positif terhadap kinerja jasa *intermediary* perdagangan. Di Balinusra, kinerja LU Perdagangan pada 2025 diperkirakan membaik didukung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara yang berdampak pada peningkatan penjualan ritel. Di Kalimantan, kinerja LU Perdagangan pada semester II 2025 diperkirakan akan ditopang oleh beberapa *event* besar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, serta didukung terjaganya pendapatan masyarakat. Sementara di wilayah lainnya, kinerja LU Perdagangan diperkirakan lebih terbatas dibandingkan kinerja tahun sebelumnya.

LU Penyediaan Akomodasi & Makanan dan Minuman (Akmamin)

Kinerja LU Akmamin pada triwulan II 2025 diperkirakan tetap terjaga. Kinerja LU Akmamin terutama ditopang perbaikan di wilayah Balinusra dan Sumatera. Periode *high season (summer holiday)* mendorong peningkatan kunjungan wisman di Balinusra. Sementara itu, peningkatan aktivitas mobilitas masyarakat pada periode *long weekend* dan libur sekolah diperkirakan mendorong peningkatan kinerja LU Akmamin di Sumatera dan tetap kuatnya kinerja LU Akmamin di wilayah lainnya. Perbaikan kinerja LU Akmamin juga sejalan peningkatan mobilitas masyarakat yang tecermin dari kenaikan jumlah perjalanan wisnus pada triwulan II dibandingkan capaian triwulan sebelumnya (Grafik I.7). Selain itu, kebijakan Pemerintah, berupa insentif diskon tarif tol dan tiket pesawat domestik, selama periode libur sekolah, juga mendukung kenaikan jumlah perjalanan wisnus pada triwulan laporan yang pada gilirannya meningkatkan kinerja LU Akmamin.



Sumber: BPS, diolah

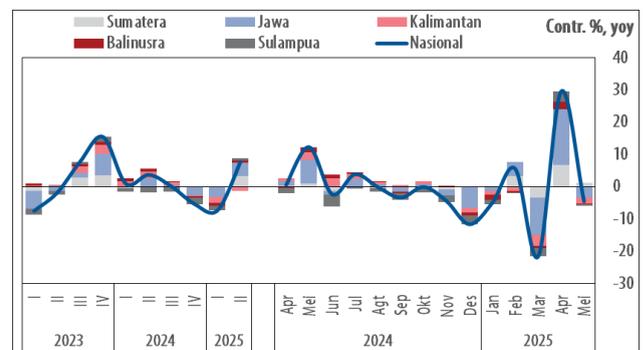
Ket.: Data triwulanan merupakan rerata di triwulan tersebut

Grafik I.7. Pergerakan Penumpang Angkutan Umum

Kinerja LU Akmamin pada 2025 diperkirakan tetap kuat. Wilayah Balinusra, Jawa dan Sumatera sebagai pintu masuk utama wisman nasional diperkirakan menopang perbaikan kinerja LU Akmamin untuk keseluruhan 2025. Selain dari dukungan kunjungan wisman, terjaganya kinerja pertumbuhan LU Akmamin juga didukung oleh aktivitas MICE Internasional dan swasta khususnya di wilayah Balinusra dan Jawa. Beberapa kebijakan Pemerintah untuk mendukung kinerja LU Akmamin, antara lain kemudahan visa bagi kunjungan wisman di Kepulauan Riau melalui Singapura, dan penambahan penerbangan internasional utamanya di Jawa dan Balinusra diperkirakan turut menjaga pertumbuhan LU Akmamin tetap baik. Namun demikian, dorongan dari penyelenggaraan MICE oleh Pemerintah terhadap kinerja LU Akmamin pada 2025 diperkirakan lebih terbatas dibandingkan kondisi pada tahun sebelumnya.

LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi triwulan II 2025 diperkirakan meningkat di seluruh wilayah, terutama di Jawa. Pertumbuhan LU konstruksi didorong oleh belanja infrastruktur Pemerintah dan proyek konstruksi swasta. Kinerja konstruksi Jawa didukung oleh konstruksi proyek swasta di industri tekstil, tembaga dan kimia di KEK dan KI serta konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan selesai pada 2025. Pembangunan konstruksi proyek swasta di juga mendorong kinerja LU Konstruksi di wilayah Kalimantan dan Sulampua, serta Balinusra. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi di Sumatera lebih didukung oleh proyek infrastruktur Pemerintah, antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di ruas Jambi, Pekanbaru dan Palembang. Perbaikan LU Konstruksi pada triwulan laporan terkonfirmasi dari indikator penjualan semen yang tumbuh lebih tinggi dari capaian pada triwulan sebelumnya (Grafik I.8).



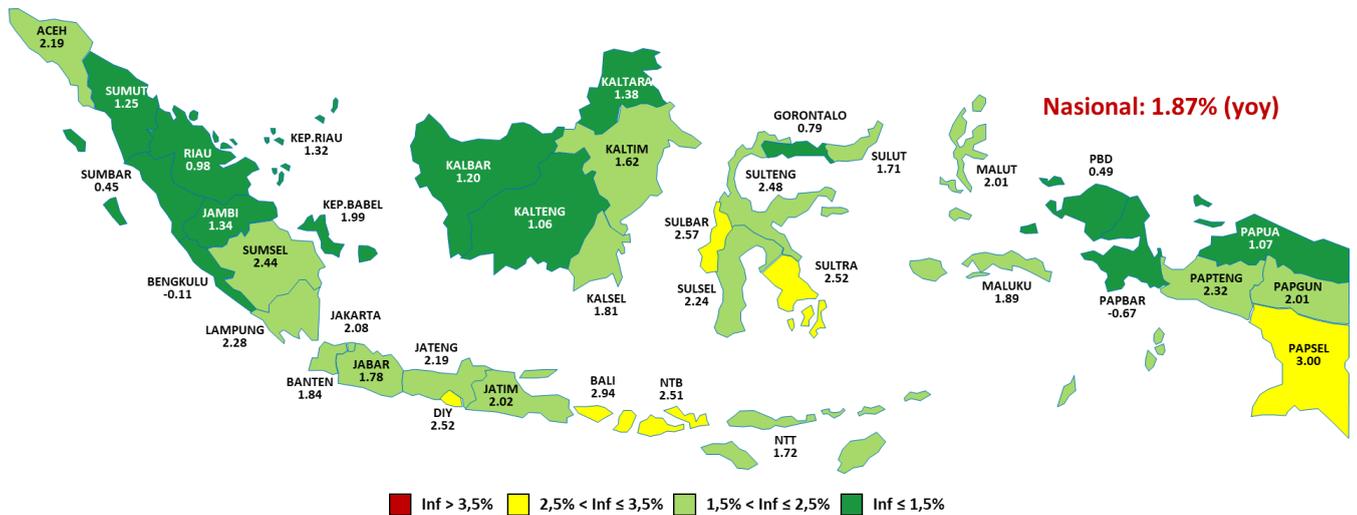
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Grafik I.8. Perkembangan Penjualan Semen

Kinerja LU Konstruksi pada keseluruhan 2025 di berbagai daerah diperkirakan tetap kuat, terutama di Balinusra. Kinerja konstruksi di Balinusra terutama didukung oleh proyek di KEK Pariwisata, infrastruktur pendukung aktivitas pertambangan di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan berlanjutnya pembangunan proyek akomodasi, terutama di Bali. Berlanjutnya konstruksi swasta di kawasan industri Jawa masih akan menjadi pendorong kinerja LU konstruksi sepanjang 2025. Sementara itu, di Sulampua, kinerja LU konstruksi ditopang oleh pembangunan proyek pada LU pertambangan dan industri logam dasar di Sulawesi dan Maluku. Di wilayah Kalimantan, perbaikan kinerja LU konstruksi bersumber dari pengembangan kawasan industri logam dasar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, di tengah terbatasnya aktivitas konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN).

BAGIAN 2

Perkembangan Terkini dan Prospek Inflasi Daerah



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.1. Peta Inflasi IHK Berdasarkan Provinsi, Triwulan II 2025 (%yoy)

Inflasi IHK gabungan kota di seluruh wilayah pada triwulan II 2025 tetap terkendali. Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan II 2025 sebesar 1,88% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan I 2025, namun lebih rendah dibandingkan pola historis. Inflasi kelompok inti terkendali sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terjaga, dampak nilai tukar yang terkendali, serta tekanan permintaan yang terbatas pascaperiode Ramadan dan Idulfitri 2025. Berakhirnya siklus panen raya mendorong kenaikan inflasi kelompok VF, meski tetap terkendali di bawah target 5%. Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok harga yang diatur Pemerintah (AP) pascaberakhirnya kebijakan diskon tarif Ramadan dan Idulfitri 2025. Berdasarkan provinsi, inflasi IHK tertinggi terjadi di Papua Selatan sebesar 3,00% (yoy) dan terendah di Papua Barat yang mengalami deflasi sebesar 0,67% (yoy) (Gambar II.1).

Inflasi inti triwulan II 2025 terjaga pada level yang rendah di seluruh wilayah. Terjaganya inflasi inti turut dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia, ekspektasi inflasi yang terjaga, meluasnya perkembangan digitalisasi, dan dampak rambatan inflasi VF yang terkendali. Dari sisi eksternal, melandainya tekanan inflasi inti terutama dipengaruhi oleh penurunan inflasi emas perhiasan seiring penurunan harga emas global. Dari sisi domestik, berkurangnya tekanan inflasi inti juga dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pascaHBKN Ramadan dan Idulfitri 2025.

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas, kopi bubuk dan minyak goreng. Inflasi ketiga komoditas tersebut tertinggi masing-masing terjadi di provinsi Papua Barat Daya untuk inflasi emas, Papua untuk inflasi kopi bubuk, dan Papua Pegunungan untuk inflasi minyak goreng.

Inflasi kelompok VF terjaga di bawah 5%. Realisasi inflasi VF pada triwulan II lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh berakhirnya siklus panen raya padi. Kenaikan inflasi juga dipengaruhi komoditas hortikultura antara lain komoditas aneka cabai disebabkan cuaca kemarau basah yang menyebabkan gangguan produksi di sejumlah daerah sentra seperti Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Namun demikian, realisasi inflasi VF pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan pola historisnya. Hal ini didukung pasokan domestik yang lebih baik sejalan faktor cuaca yang lebih baik dan dukungan kebijakan intervensi Pemerintah untuk mendorong produksi komoditas pangan. Terkendalnya inflasi VF juga ditopang oleh kuatnya sinergi upaya pengendalian inflasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Inflasi kelompok AP meningkat di seluruh wilayah. Inflasi AP pada triwulan II 2025 utamanya disumbang oleh inflasi komoditas rokok dan tarif air minum PAM. Harga Jual Eceran (HJE) rokok meningkat di seluruh wilayah, sedangkan tarif air minum PAM meningkat di beberapa provinsi di Sumatera dan Jawa. Namun demikian,

kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi angkutan seiring berbagai insentif tarif angkutan umum pada periode HBKN Iduladha dan periode libur sekolah yang mencakup: diskon tarif Kereta Api sebesar 30% di Jawa, dan insentif PPN DTP angkutan udara sebesar 6% di seluruh wilayah. Secara spasial, deflasi terdalam jasa angkutan penumpang terjadi di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya di provinsi Papua, Pegunungan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

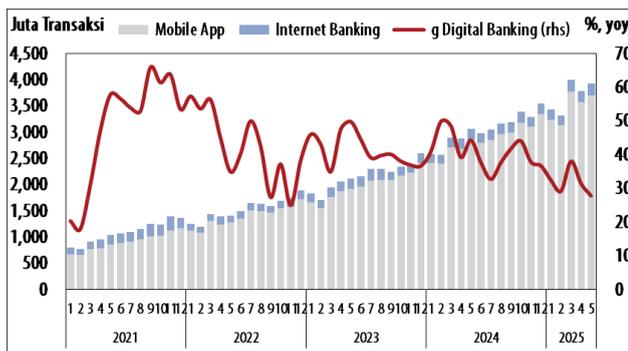
Inflasi IHK 2025 di seluruh wilayah diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran 2,5±1%. Terkendalinya inflasi dalam kisaran sasaran seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjaga, *imported inflation* yang terkendali,

dampak rambatan VF yang terkendali, dan dampak positif digitalisasi. Pada kelompok VF, inflasi terjaga sesuai target di bawah 5% (yoy) didukung pasokan yang lebih baik di daerah sentra seiring upaya pengendalian inflasi. Fokus upaya pengendalian inflasi pangan ditujukan untuk memastikan kelancaran distribusi dari daerah sentra ke non-sentra, menjaga ketersediaan pasokan, dan memonitor perkembangan harga di seluruh daerah. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta mitra strategis melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

BAGIAN 3

Perkembangan Terkini Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi ekonomi dan keuangan digital Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Mei 2025, volume transaksi *digital payments*, yang mencakup pembayaran melalui aplikasi *mobile* dan *internet banking*, tumbuh sebesar 27,88% (yoy) (Grafik III.1). Sejalan dengan itu, volume transaksi uang elektronik juga meningkat sebesar 27,37% (yoy), didorong oleh pertumbuhan transaksi kartu kredit. Penggunaan QRIS juga terus tumbuh, dengan total jumlah *merchant* yang terdaftar mencapai 38,6 juta *merchants*, jumlah pengguna yang meningkat hingga 56,8 juta pelanggan, dan volume transaksi yang tumbuh 151,70% (yoy) (Grafik III.2).

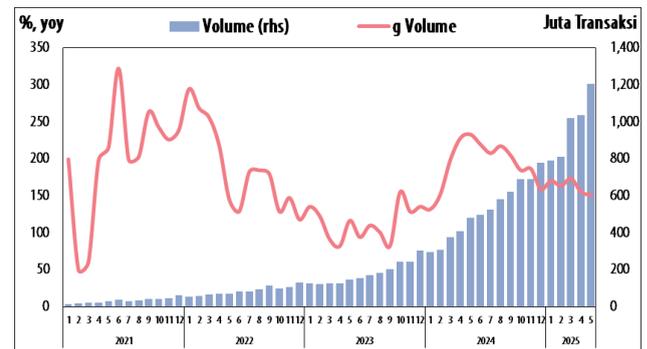


Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.1. Transaksi Digital Banking

Transaksi sistem pembayaran Bank Indonesia dan uang yang diedarkan tumbuh positif. Transaksi dengan menggunakan BI FAST baik volume maupun nilai masing-masing tumbuh sebesar 45,45% (yoy) dan 37,00% (yoy). Meningkatnya penggunaan transaksi nontunai mengindikasikan perbaikan efisiensi perekonomian dan kecepatan transaksi sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu,

aktivitas transaksi tunai juga tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Jumlah uang yang diedarkan (UYD) pada Mei 2025 tercatat tumbuh sebesar 10,1% (yoy), membaik dari bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,28% (yoy). Hal ini menunjukkan peningkatan kebutuhan uang yang tetap baik pascaberlaluannya periode HBKN Idulfitri.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik III.2. Transaksi QRIS

Bank Indonesia akan terus mendorong digitalisasi sebagai salah satu upaya pengembangan ekonomi maupun peningkatan produktivitas. Sistem pembayaran digital menjadi kunci akselerasi berkembangnya ekonomi keuangan digital. Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong implementasi digitalisasi system pembayaran dengan memperluas elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, elektronifikasi pada sektor transportasi maupun eletronifikasi pada sektor lainnya. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan akseptansi sistem pembayaran digital melalui edukasi dan literasi, bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan stakeholders terkait.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAGIAN 4

Isu Strategis: Potensi *Demand* dan *Supply* Pembiayaan dalam Mendukung Intermediasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pendahuluan

Perekonomian global masih diliputi ketidakpastian tinggi di tengah prospek perekonomian nasional yang masih belum kuat. Pertumbuhan PDB global tahun 2025 diperkirakan terbatas sebesar 3,0% dengan dibayangi risiko fragmentasi harga sejumlah komoditas kecuali emas, serta masih tingginya ketidakpastian dan risiko global. Ketegangan geopolitik seperti konflik di Kawasan Timur Tengah juga berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan pada perekonomian nasional, terutama dari sisi risiko disrupsi rantai pasok global dan peningkatan inflasi barang impor. Dari sisi domestik, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia belum cukup kuat di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang secara struktur masih tersegmentasi, termasuk di sektor perbankan. Untuk itu, bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, baik Pusat dan Daerah diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi regional yang sesuai target, dengan kinerja produktivitas dan kapasitas beberapa sektor utama yang berpotensi dapat ditingkatkan ke depan.

Bank Indonesia terus memperkuat stabilitas ekonomi guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan melalui bauran kebijakan. Dalam kerangka ini, kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, sementara kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan secara optimal seiring terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Sebagai upaya penguatan intermediasi, telah dilakukan perumusan dan formulasi kebijakan instrumen makroprudensial melalui penerapan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 2023 bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), serta Unit Usaha Syariah (UUS). Melalui KLM, perbankan diberikan ruang yang lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga dapat memperkuat likuiditas sekaligus menjaga risiko kredit agar tetap rendah. Dari sisi permintaan, KLM juga berperan dalam mendukung pertumbuhan kinerja korporasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, insentif makroprudensial yang lebih *targeted* juga berpotensi

memperkuat kinerja sektoral, baik secara nasional maupun wilayah.

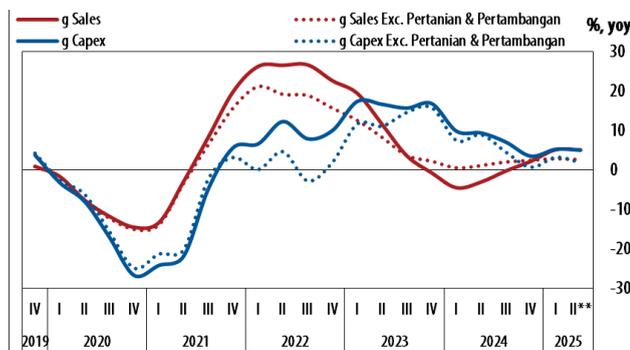
Dalam mendukung intermediasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan sisi permintaan dan penawaran untuk memetakan berbagai sektor potensial dan kendala pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan perbankan. Dari sisi permintaan, kinerja korporasi secara agregat masih terjaga, tecermin dari pertumbuhan penjualan dan belanja modal (*capital expenditure / capex*) yang masih tinggi di seluruh wilayah, serta kemampuan bayar (ICR) yang tetap kuat. Di sisi lain, adanya tantangan seperti dinamika global dan domestik yang masih tinggi, serta tingginya penggunaan dana internal dalam rencana bisnis, ekspansi, maupun investasi berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja korporasi. Selain itu, perlambatan kinerja UMKM juga perlu menjadi perhatian. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit secara umum masih tumbuh dalam kisaran target Bank Indonesia dengan risiko kredit yang terjaga. Beberapa tantangan pembiayaan memerlukan dukungan strategi kebijakan antara lain terkait moderasi intermediasi, keterbatasan *risk appetite* perbankan, hingga kredit UMKM yang melambat disertai peningkatan risiko.

Upaya mendorong intermediasi perbankan dapat diperkuat melalui sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta melalui peningkatan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor potensial. Fokus strategi ini diarahkan pada penyempurnaan skema pembiayaan, perluasan akses, dan insentif kebijakan sehingga prospek pembiayaan tetap terjaga. Inovasi model pembiayaan dan transformasi kebijakan melalui sinergi dan koordinasi dengan otoritas keuangan dan K/L di setiap daerah perlu terus diperkuat dan dilakukan secara lebih terstruktur. Upaya penguatan kebijakan akan difokuskan pada optimalisasi insentif KLM dengan fokus penyaluran pada sektor-sektor potensial di daerah, termasuk pengembangan model bisnis dan skema pembiayaan yang sesuai. Melalui berbagai upaya penguatan dan strategi dimaksud, diharapkan target pertumbuhan kredit dapat terjaga pada kisaran 8% – 11% di tahun 2025

dan 8% - 12% di tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6% - 5,4% di tahun 2025 dan 4,7% - 5,5% di tahun 2026, serta optimalisasi insentif KLM hingga mencapai 5% dapat tercapai.

Asesmen Sisi Permintaan

Secara keseluruhan, kinerja korporasi masih terjaga disertai dengan masih adanya potensi peningkatan kredit. Pertumbuhan penjualan dan capex korporasi diperkirakan mencatatkan pertumbuhan positif yang dikontribusikan oleh sektor pertambangan dan pertanian (Grafik IV.1), sementara perlambatan terutama terjadi pada sektor perdagangan seiring dengan masih belum cukup kuatnya daya beli masyarakat. Secara spasial, penjualan korporasi masih positif meski terbatas di seluruh wilayah, sejalan dengan belanja modal korporasi yang relatif tinggi, meskipun pada Sumatera relatif tertahan. Secara umum, peningkatan belanja modal korporasi didorong oleh meningkatnya kebutuhan ekspansi usaha dalam mendukung aktivitas penjualan di tengah ketidakpastian dan risiko global yang masih tinggi. Meningkatnya kebutuhan investasi dan penjualan berpotensi meningkatkan *demand* pembiayaan. Selain itu, terdapat peluang bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada korporasi yang ingin melakukan ekspansi dan meningkatkan operasional penjualan, sehingga memperluas ruang intermediasi.



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik IV.1. Perkembangan Kinerja Korporasi Tbk.

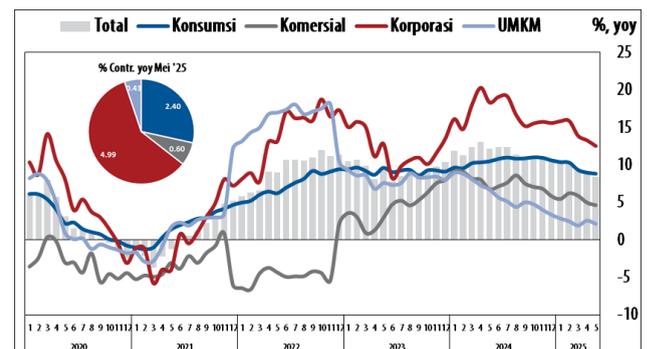
Perkembangan aspek ketahanan secara agregat juga masih kuat tecermin dari terjaganya kemampuan bayar dan *leverage* korporasi. Realisasi *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi pada triwulan I 2025 diperkirakan jauh lebih tinggi diatas *threshold* 1.0 kali, meskipun sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya yang dipengaruhi oleh penurunan profitabilitas (EBIT). Kemampuan bayar yang terjaga menunjukkan bahwa korporasi memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan kewajiban bunga, sehingga mampu melunasi pembayaran atas pinjaman. Penurunan

kemampuan bayar korporasi berimplikasi pada kenaikan *debt at risk*, terutama pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Secara spasial, mayoritas ICR korporasi masih kuat, utamanya terlihat di wilayah Jawa, Balinusra, dan Sulampua. Sementara, wilayah Sumatera dan Kalimantan sedikit menurun sejalan dengan penurunan profitabilitas korporasi.

Kondisi kinerja UMKM pada Triwulan I 2025 menurun seiring dengan lemahnya permintaan. Penurunan kinerja tersebut terjadi merata pada seluruh skala usaha dan sektor usaha. Penyebab menurunnya kinerja UMKM ini cenderung dipengaruhi dari sisi permintaan dan faktor operasional. Meski demikian, profit UMKM relatif tetap terjaga yang ditopang dengan biaya dan harga jual yang tetap. Dalam mendukung modal kerja dan biaya operasional, UMKM membutuhkan pembiayaan eksternal, terutama yang bersumber dari perbankan.

Asesmen Sisi Penawaran

Pertumbuhan kredit masih dalam kisaran target Bank Indonesia, walaupun relatif melambat. Pembiayaan dari perbankan termoderasi dengan peningkatan kredit Mei 2025 sebesar 8,43% yoy, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 12,15% yoy (Grafik IV.2). Pertumbuhan kredit ditopang oleh segmen korporasi, khususnya sektor pertambangan dan jasa, terutama di wilayah Balinusra. Secara spasial, beberapa sektor mengalami peningkatan kredit, seperti sektor pertanian di Sumatera seiring harga CPO yang membaik dan sektor pertambangan di Balinusra dan Sulampua seiring tingginya harga emas.



Sumber: LBUT Antasena, diolah

Grafik IV.2. Perkembangan Kredit per Segmen

Pertumbuhan kredit UMKM kembali menurun, disertai dengan peningkatan risiko. Kredit UMKM tumbuh hanya 2,17% yoy pada Mei 2025 dengan tren menurun. Adapun penurunan tersebut dikontribusikan oleh segmen mikro dan menengah yang mengalami kontraksi. Mayoritas kredit UMKM sektoral mengalami penurunan utamanya sektor industri pengolahan dan perdagangan yang

masih mencatatkan kontraksi, kecuali kredit UMKM pertanian yang masih tumbuh. Dari sisi risiko, kredit UMKM terus meningkat, utamanya sektor industri pengolahan dan konstruksi yang mencatatkan NPL diatas 5%. Perlambatan kredit UMKM terjadi di semua wilayah yang disertai peningkatan NPL, utamanya perlambatan tertinggi di wilayah Jawa dan Balinusra.

Sementara itu, risiko kredit secara sektoral dan spasial tetap terjaga. Rasio NPL terjaga rendah dengan tren LAR yang cenderung menurun di seluruh wilayah dan mayoritas sektor. Secara spasial, terdapat tren kenaikan NPL pada jangka pendek di Kalimantan dan Sulampua. Secara sektoral, risiko kredit pada sektor konstruksi menunjukkan perbaikan di sebagian besar wilayah, meskipun masih tergolong tetap tinggi (>5%) di seluruh wilayah selain Jawa.

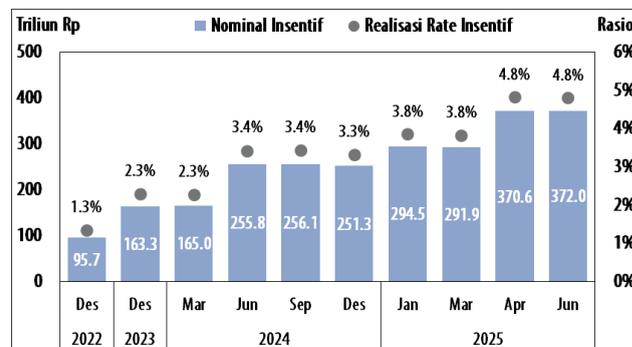
Moderasi intermediasi perbankan dipengaruhi oleh tekanan likuiditas dan *lending appetite*. Dari sisi likuiditas, pertumbuhan DPK melambat hampir di seluruh wilayah, terutama Jawa dan Sulampua, dengan pangsa DPK tertinggi berada di Jawa sekitar 78% pada Mei 2025. Adapun *lending appetite* juga mengetat hampir di seluruh sektor dan jenis penggunaan. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang termoderasi. Sementara itu, preferensi perbankan untuk menempatkan aset di kredit masih relatif tinggi seiring dengan imbal hasil yang juga tinggi.

Ke depan, terdapat masih terdapat potensi perluasan pembiayaan korporasi khususnya pada sektor pertanian, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, serta industri pengolahan. Berdasarkan hasil survei akses dan kelayakan pembiayaan korporasi Juni 2025, permintaan pembiayaan beberapa daerah cenderung stabil dan berpotensi meningkat terbatas pada triwulan II 2025. Dalam menghadapi dinamika global dan domestik seperti depresiasi nilai tukar, mayoritas korporasi memilih untuk melakukan efisiensi belanja operasional dan melakukan *passthrough* ke harga jual. Beberapa wilayah masih memiliki minat investasi meningkat di tengah ketidakpastian, seiring dengan peningkatan penjualan dan profit margin. Kenaikan permintaan pembiayaan di beberapa wilayah utamanya didorong oleh pemenuhan kebutuhan aktivitas operasional korporasi khususnya pada sektor pertanian, penyediaan akomodasi makanan dan

minuman, serta industri pengolahan. Dalam upaya melakukan pengolahan lanjutan (hilirisasi), korporasi membutuhkan modal besar di tengah kendala kesulitan akses pembiayaan akibat persyaratan yang ketat, kendala agunan, serta ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Namun demikian, tetap terdapat potensi perluasan pembiayaan korporasi yang masih terbuka ke depan, seiring banyaknya korporasi yang belum memiliki fasilitas kredit.

Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi

Bank Indonesia memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Pada 1 April 2025, Bank Indonesia meningkatkan insentif KLM¹ dari paling besar 4% menjadi paling besar 5% terhadap DPK dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas perbankan dalam mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya di bidang perumahan. Penguatan KLM tersebut memberikan tambahan kelonggaran likuiditas bagi perbankan atas pembiayaan kepada sektor perumahan sekitar Rp80 triliun, sehingga total insentif likuiditas yang diterima oleh perbankan adalah sekitar Rp370 Triliun atau sebesar ±4,8% terhadap DPK rupiah bank (Grafik IV.3).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.3. Perkembangan KLM

Secara spasial, pencapaian nominal KLM mayoritas dikontribusikan oleh Pulau Jawa, sejalan dengan pangsa kredit yang besar pada wilayah tersebut. Perhitungan besaran nominal KLM secara spasial didasarkan dengan pendekatan proporsi kredit sektor prioritas wilayah terhadap total kredit sektor prioritas secara nasional.

¹ Insentif likuiditas KLM diberikan dalam bentuk pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perekonomian, inklusif, dan berwawasan lingkungan

Berdasarkan pendekatan tersebut, nominal insentif KLM yang diperoleh wilayah Jawa utamanya berasal dari sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan serta sektor perumahan. Sumatera mencatatkan pencapaian nominal insentif KLM yang terbesar kedua, dikontribusikan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Adapun wilayah lainnya seperti Balinusra, Kalimantan, dan Sulampua mendapatkan nominal insentif yang lebih kecil seiring eksposur kredit yang juga kecil.

Penerapan KLM telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan kredit pada hampir seluruh sektor prioritas. Hal ini tecermin dari pertumbuhan kredit pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, serta sektor transportasi pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang lebih tinggi pasca implementasi kebijakan KLM. Sementara pertumbuhan kredit ke sektor perumahan tertahan peningkatan risiko kredit, khususnya pada masyarakat menengah dan bawah.

Penerapan KLM turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan kredit di hampir seluruh wilayah (Gambar IV.1). Berdasarkan hasil pemantauan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jawa menjadi satu-satunya wilayah dengan pertumbuhan kredit yang meningkat di seluruh sektor prioritas pasca implementasi KLM. Sementara itu, Sulampua masih mencatatkan pelemahan pertumbuhan kredit pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan serta sektor transgud, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Khususnya pada sektor perumahan, dampak dari insentif KLM terhadap pertumbuhan kredit bervariasi antarwilayah, dimana pertumbuhan kredit pada sektor ini belum optimal di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Wilayah	Pertumbuhan Kredit Sektor Prioritas pasca Implementasi KLM		
	Pertanian, Perdagangan, Industri	Transgud, Pariwisata, Ekraf	Perumahan
Sumatera	▲	▲	▼
Jawa	▲	▲	▲
Bali Nusra	▼	▲	▲
Kalimantan	▲	▲	▼
Sulampua	▼	▼	▲

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar IV.1. Pertumbuhan Kredit Sektor Prioritas pasca Implementasi KLM

Implementasi KLM perlu dibarengi dengan pengembangan model pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan riil di daerah. Tantangan utama pembiayaan di daerah meliputi akses pembiayaan yang terbatas dan

model pembiayaan yang mayoritas dilakukan melalui *direct financing* sehingga belum dapat mengakomodasi preferensi bank maupun kebutuhan dunia usaha. Model pembiayaan yang sudah sesuai dengan karakteristik sektor unggulan daerah dapat terus dioptimalkan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki fokus sektor unggulan yang sama. Di sisi lain, beberapa model pembiayaan seperti skema bayar saat panen untuk sektor pertanian, serta skema sindikasi, *value chain financing*, *avalist line*, dan pembiayaan berbasis *non-cash loan* untuk sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan termasuk di daerah melalui sinergi pusat dan daerah. Di level Pusat, Bank Indonesia melakukan sinergi kebijakan dengan Pemerintah, otoritas keuangan, Kementerian/Lembaga di berbagai forum dalam rangka memperkuat dukungan pembiayaan dari sisi *demand*. Selanjutnya, dalam rangka mendorong *appetite* perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor KLM unggulan, Bank Indonesia melalui Forum Diskusi Makroprudensial akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak pengambil keputusan di perbankan baik dari level pusat maupun daerah. Bank Indonesia turut memperkuat penyaluran kredit bank dengan kebijakan pendanaan dan likuiditas melalui pelonggaran Kebijakan Rasio Pembiayaan Luar Negeri (RPLN) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).

Di daerah, Bank Indonesia melakukan sinergi kebijakan melalui Kantor Perwakilan Dalam Negeri melalui beberapa strategi. Pertama, pada strategi peningkatan akses pembiayaan pelaku usaha, Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia akan terus memperkuat peran *strategic advisory* kepada *stakeholders* dan pelaku usaha di daerah, termasuk untuk penguatan sektor unggulan, pengembangan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan literasi keuangan, serta promosi sektor potensial daerah. Selanjutnya, pada strategi pengembangan model pembiayaan, Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia akan melakukan identifikasi dan replikasi model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik sektor potensial dan UMKM di masing-masing daerah. Pengembangan model pembiayaan yang tepat sesuai kebutuhan usaha juga akan ditempuh dengan *business matching* dan promosi perdagangan antara lain pada pelaksanaan *flagship event* di daerah.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Firman Mochtar

Koordinator Penyusun

Tri Yanuarti

Evie Sylviani

Tim Penulis

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Grup Sektoral dan Regional

Maximilian Timothy Tutuarima

Archi Hilmardhany

Ide Mahendra

Ramdha Dien Azka

Viyasa Rahyaputra

Rasyid Ramadhan Samsuri

Archie Flora Anisa

Reffi Marizka Dewi

Departemen Kebijakan Makroprudensial

Hesti Werdaningtyas

Justina Adamanti

Muhammad Farhan Perdana

Faried Caesar Nugroho

Irman Ramdani

Alya Ridha Aisy



JL. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id